

PEMERINTAH KUCURKAN RP2,02 TRILIUN UNTUK PENGEMBANGAN MANDALIKA



<https://www.google.com/search>

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah¹ akan mengucurkan anggaran sebesar Rp2,02 triliun pada 2020 untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus² Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat meninjau sirkuit Moto GP di Mandalika, NTB, Kamis, menegaskan semua kebutuhan dasar KEK Mandalika, harus rampung pada 2020, sehingga berbagai persiapan dan kebutuhan untuk menunjang kawasan, segera diusulkan kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian yang sudah ditunjuk.

"Untuk tahun 2020, total alokasi dukungan anggaran untuk destinasi super prioritas Mandalika mencapai Rp2,02 triliun. Saya berharap dana ini segera dikawal oleh ITDC³ untuk melakukan berbagai program ke depannya," ujarnya.

Arief menjelaskan Kementerian PUPR⁴ pada tahun 2020 mengalokasikan Rp1.747 miliar untuk perservasi jalan dari Bandara Internasional Lombok (BIL)-Kuta.

Selain itu, dana itu juga digunakan untuk pengembangan ruang terbuka publik dan promenade di pesisir pantai selatan, serta pengembangan wisata di kawasan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

"Dari PUPR, dana ini juga disiapkan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan rumah susun dan berbagai program lainnya. Sementara di Kementerian Pariwisata sendiri ada Rp118,25 miliar untuk fasilitas pengembangan destinasi wisata, fasilitas promosi, dan peningkatan kapasitas, serta potensi pariwisata," jelas Arief Yahya.

Selain itu juga ada anggaran di berbagai kementerian lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PDT, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dana tersebut, lanjutnya, harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan KEK Mandalika. Terlebih ke depan akan ada ajang MotoGP yang akan menjadi daya tarik wisatawan.

"Apapun kebutuhan dasar harus bisa diselesaikan pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021, MotoGP bisa berjalan. Termasuk bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat. Mereka harus kita berikan berbagai pelatihan juga," terangnya.

Sementara itu, Direktur ITDC Abdulbar M Mansoor menegaskan saat ini pihaknya terus membenahi Mandalika, terutama untuk lintasan Sirkuit MotoGP.

Ke depan, ia juga akan terus mengawal berbagai program pemerintah dalam mendukung kawasan itu.

"Pada tahun 2021, sebanyak 1.000 kamar hotel sudah bisa ditempati, mulai dari Pullman, Royal Tulip, dan hotel lainnya. Termasuk berbagai persiapan menyambut event MotoGP sudah mulai kita laksanakan, termasuk mitigasi bencana juga kita lakukan. Ke depan kita berharap berbagai pembangunan bisa berjalan dengan baik," harapnya.

Ia mengatakan progres pembangunan yang ada saat ini sudah sangat baik. Terlebih dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka ke depan berbagai pembangunan ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

"Mulai dari optimalisasi UMKM, penyusunan pedoman dan lain sebagainya sudah kita lakukan, dan juga akan ada penghijauan di perbukitan, dengan melakukan tanam bunga, biar menjadi Pink Mandalika," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/1107096/pemerintah-kucurkan-rp202-triliun-untuk-pengembangan-mandalika/10/10/2019>
2. <https://www.lombokpost.net/2019/10/11/mandalika-disuntik-rp-202-triliun-sirkuit-motogp-sudah-10-persen/11/10/2019>

Catatan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika adalah merupakan salah satu kawasan pengembangan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dari beberapa kawasan ekonomi yang dijadikan menjadi target pengembangan kawasan untuk

menunjang pertumbuhan ekonomi negara. KEK Mandalika diteapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2014 tentang Kawasan ekonomi Khusus Mandalika.

Dalam Pasal 2 PP nomor 52/2014 tentang KEK Mandalika, menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memiliki luas 1.035,67 ha (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pengembangan KEK Mandalika akan diserahkan dan dikelola oleh BUMN yang bernama ITDC, untuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan KEK Mandalika akan dianggarkan dalam APBN ataupun APBD dengan sekema pembiayaan baik dari APBN ataupun pinjaman luar negeri. Seperti yang diatur dalam pasal 5 PP 52/2014 menyatakan bahwa Pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibab, mendefinisikan bahwa Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman luar negeri bersumber dari:

1. Kreditor Multilateral;
2. Kreditor Bilateral;
3. Kreditor Swasta Asing; dan
4. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. [vide: Psl 6 PP No. 10 Tahun 2011].

Penggunaan Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:

1. membiayai defisit APBN;
2. membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;
3. mengelola portofolio utang;
4. diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
5. diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau
6. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. [vide: Psl 7 PP No. 10 Tahun 2011].

END NOTE/CATATAN AKHIR

¹ **Pemerintah** adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu [vide: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>]

² **Kawasan Ekonomi Khusus** yang selanjutnya disebut **KEK** adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu [vide: Pasal 1 angka (1) PP Nomor 2/2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus]

³ **PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Coporation** adalah sebuah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata. ITDC berdiri dengan nama Bali Tourism Development Corporation yang mengelola area komersial Nusa Dua menjadi destinasi wisata dunia di Indonesia. [vide: <https://id.wikipedia.org/wiki/>]

⁴ **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR)** adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat [vide: <https://id.wikipedia.org/wiki/>]